RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

NAMA : ALVIN HIDAYAT

NIM. : 10200120250

KELAS : HTN f

1. Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : Di Belanda umumnya memakai istilah "staatsrech" yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti sempit). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah "Constitutional Law", penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang mempergunakan istilah "Droit Constitutionnel" yang di lawankan dengan

"Droit Administrative", dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwaltungsrecht: Hukum Administrasi negara.

2. Pendapat ahli Hukum mengenai definisi Hukum Tata Negara Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tata negara menurut para ahli, terdiri atas:

1.. Menurut Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat

hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu sertamenentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

2. Menurut Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.

Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

3. Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

4. Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

5. Menurut Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya "textbook of Jurisprudence" yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.

6. Menurut Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.

7. Menurut Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.

8. Menurut Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat

Negara.

9. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

10. Menurut J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga.

11. Menurut J. Apeldorn

Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

12. Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu didalam suatu Negara.

13. Menurut Van Vollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan

masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

14. Menurut Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara. menurut

Prof. Logemann adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

15. Menurut Mac Iver

Menurut Mac Iver bahwa Negara itu sebagai suatu political organization, harus di bedakan

dari "masyarakat". Negara itu suatu Organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara itu organisasi dalam masyarakat,

yaitu organisatie-kapstok.

16. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, S.H.

Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa: "Hukum

Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk

pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

17. Menurut Vollenhoven

Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum

bawahan serta hubungannya menurut hierarki serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis.

18. Menurut Wade dan Phillips

Dalam bukunya yang berjudul "Constitutional law" yang terbit pada tahun 1936 .

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.

19. Menurut A.V. Dicey

Dalam bukunya "An introduction the study of the law of the consrtitution ",dicey

mengatakan "as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly affect to distribution or exercise of the sovereign power inthe state ".Hukum Tata Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan "all rules") yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

20. Menurut Van der pot

Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di perlukan serta wewenangny masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.

21. Menurut Scholten

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kesimpulan: Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

22. Menurut Austin

Mengatakan bahwa Constitutional Law menentukan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu dari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewa tertentu (Sovereign power) dalam negara.

23. Menurut Apeldorn

Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.hukum tata negara di istilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.

24. Menurut Logemann

Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia”
, Logemann mengatakan : Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara
* Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi
*Fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi
yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain. Secara Yuridis,
Maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

25. Menurut Maurice du verger

Hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur
organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga – Organisasi dan fungsi politik lembaga
negara.

26. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau
federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan/ republik) yang menunjukkan masyarakat hukum
baik atas maupun bawahan beserta tingkatannya (hierarchie) yang selanjutnya menegaskan
wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya
menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat
hukum itu beserta susunan (terdiri dari orang atau sejumlah orang), wewenang tingkatan imbang
dari dan alat perlengkapan negara itu.

*HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM TATA USAHA
NEGARA .

Seperti telah Anda pelajari di atas bahwa hukum negara dibedakan
dalam arti sempit Hukum Tata Negara dan arti luas mencakup Hukum Tata
Usaha Negara. Persoalan yang muncul karena objek studinya sama dalam arti negara dan
kekuasaan adalah apakah perbedaan dan bagaimana cara
membedakannya. Bahkan timbul pertanyaan apakah masih relevan perbedaan

tersebut? Usep Ranuwidjaja (1982) setelah mengamati beberapa pendapat yang terumuskan dalam beberapa definisi menyimpulkan bahwa masih dapat membenarkan adanya pembagian ini, didasarkan atas adanya perbedaan jenis tugas kenegaraan yang mengakibatkan keharusan pembedaan jenis alat perlengkapan, seperti diterangkan di atas. Untuk membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara muncul beberapa teori. Hal ini berkenaan dengan cenderung sulit untuk membedakannya sehubungan dengan memiliki pusat kajian yang sama berkisar pada pengaturan hukum tentang organisasi negara.